

**PENATAUSAHAAN ASET DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT**

Pandu Setiawan Gulo

NPP. 31.0082

Asdaf Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi: Keuangan Publik

Email: pandusetiawangulo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The West Nias Regency Government, like other regional governments in Indonesia, has the responsibility to ensure transparent and accountable financial reports as part of the principles of good governance. One crucial aspect in this case is fixed asset management. However, challenges in administering fixed assets, such as accurate recording and complete inventory, are still the main focus. Purpose:* *The purpose is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of asset administration, find out and analyze what inhibiting factors cause asset administration, as well as describe and analyze the efforts made by the West Nias Regency government. Method:* *This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Result:* *The research results show that the implementation of fixed asset administration in the West Nias Regency government has been effective. The administration processes carried out are bookkeeping, inventory and reporting. The bookkeeping process has been carried out using a digital system using SIMDA-BMD which has been integrated with applicable regulations so as to minimize errors in the recording format. Then the fixed asset inventory process is carried out at least once a year which is followed up by providing labels and goods inventory cards (KIB). Reporting as a form of accountability has been attempted on time. Conclusion:* *The implementation of fixed asset administration in the West Nias Regency Government is effective by using the SIMDA-BMD digital system which is integrated with applicable regulations. However, there are obstacles such as limited facilities, human resource capabilities, employee rotation and budget. Efforts made include outreach, implementation of systematic procedures, and development of human resource capabilities. Recommended suggestions include increasing network connectivity, budget allocation for certification training, employee rotation based on competency, and optimizing budget use.*

Keywords: *Effectiveness of Asset Management, Financial Reports, Fixed Assets*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pemerintah Kabupaten Nias Barat, sebagaimana pemerintah daerah lainnya di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari prinsip good governance. Salah satu aspek krusial dalam hal ini adalah pengelolaan aset tetap. Namun, tantangan dalam penatausahaan aset tetap, seperti*

pencatatan yang akurat dan inventarisasi yang lengkap, masih menjadi fokus utama. **Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penatausahaan aset, mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat yang menyebabkan penatausahaan aset, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Nias Barat sudah berjalan efektif. Proses penatausahaan yang dilakukan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Proses pembukuan sudah dilakukan dengan sistem digital menggunakan SIMDA-BMD yang sudah terintegrasi dengan regulasi yang berlaku sehingga mampu meminimalisir kesalahan dalam format pencatatan. Kemudian proses inventarisasi aset tetap sudah dilakukan setidaknya sekali dalam setahun yang ditindaklanjuti pada pemberian label dan kartu inventaris barang (KIB). Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sudah diupayakan tepat waktu. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Nias Barat efektif dengan menggunakan sistem digital SIMDA-BMD yang terintegrasi dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat hambatan seperti keterbatasan sarana, kemampuan sumber daya manusia, rotasi pegawai, dan anggaran. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, penerapan prosedur sistematis, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Saran yang disarankan mencakup peningkatan konektivitas jaringan, alokasi anggaran untuk pelatihan sertifikasi, rotasi pegawai berdasarkan kompetensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Kata kunci: *Aset Tetap, Efektivitas Penatausahaan, Laporan Keuangan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki tugas untuk memastikan kualitas laporan keuangan disajikan dengan baik. Laporan keuangan menjadi tolak ukur paling efektif untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan setiap kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan daerah yaitu aset sebagai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, sehingga pengelolaan aset yang baik akan memastikan pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik juga (Sukran et al., 2020).

Sejak tahun 2015, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun yang menjadi penerapan standar tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar dari pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan gambaran kinerja entitas serta kondisi fiskal daerah tersebut.

BPK selaku auditor eksternal memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah melalui LKPD. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan disampaikan berdasarkan tingkat kewajaran informasi keuangan melalui opini BPK. Opini atau pendapat BPK terdiri atas 4 (empat), yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai SAP, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan dengan kriteria SPI memadai namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan, Opini Tidak Wajar (TW) diberikan jika SPI tidak memadai dan terdapat salah saji

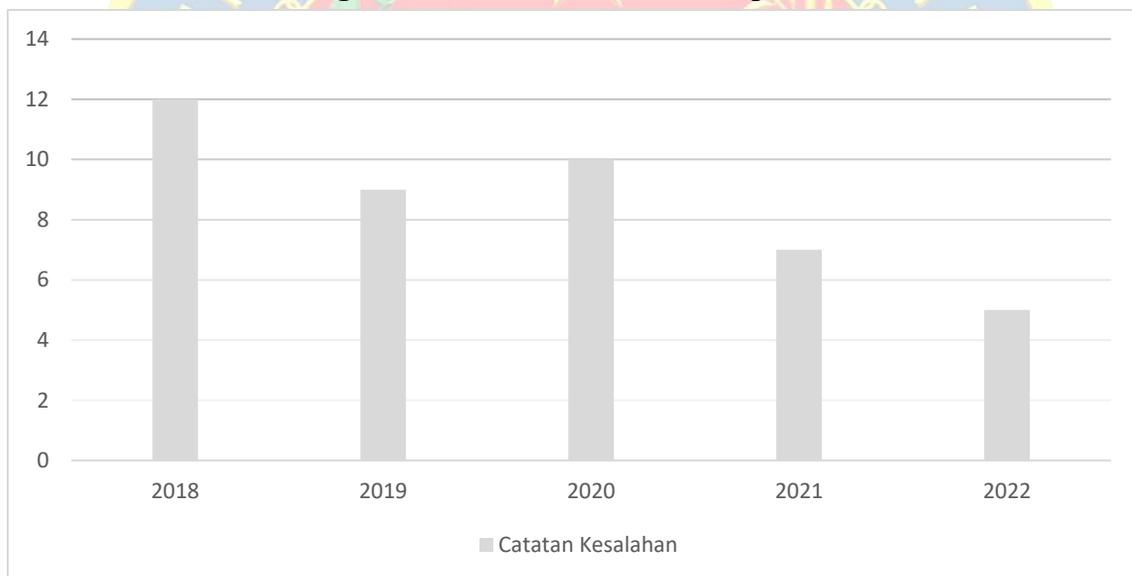
pada banyak pos laporan keuangan yang material, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti atau SPI yang sangat lemah (Meo et al., 2021).

Pentingnya untuk memperoleh opini yang baik dari BPK akan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dan juga meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah Kabupaten Nias Barat. Bukan suatu hal yang mudah untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya mengingat setiap entitas harus dapat saling berkoordinasi dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan penatausahaan aset di Kabupaten Nias Barat. Gambar berikut adalah kondisi penatausahaan aset Kabupaten Nias Barat yang direfleksikan melalui catatan BPK dalam lima tahun terakhir.

Gambar 1. 1
Perkembangan Penatausahaan Aset Kabupaten Nias Barat



Sumber: (*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018-2022*, diolah oleh penulis 2023)

Dari gambar tersebut diatas, dapat diamati melalui opini yang diberikan oleh BPK dalam 5 tahun terakhir terhadap LKPD pemerintah Kabupaten Nias Barat mengalami ketidakstabilan dari tahun 2018-2020 hingga kemudian terjadi peningkatan yang baik dari 2020-2022 yang ditandai dengan pemberian opini WTP pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun sudah mendapatkan opini WTP masih terdapat catatan penting berupa paragraf yang masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan. Tabel berikut merupakan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias tahun 2021-2022

Tabel 1. 1
Belanja APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2022

| Uraian | 2021 Jumlah (Rp) | 2022 Jumlah (Rp) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Belanja Operasi | 417.838.991.683 | 456.535.708.517 |
| Belanja Modal | 76.379.262.325 | 183.451.575.533 |
| Belanja Tidak Terduga | 6.492.296.755 | 2.000.000.000 |
| Belanja Transfer | 165.941.703.045 | 143.612.241.100 |
| Jumlah Belanja | 666.652.253.808 | 785.599.525.150 |

Sumber: (APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2022, diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan data APBD diatas bahwa dari tahun 2021 ke 2022 pada belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan dengan persentase terhadap jumlah belanja berturut-turut adalah 11,45% dan 23,35%. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penatausahaan aset daerah. Penelitian Rasyidah Mustika yang berjudul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, penatausahaan aset tetap memperoleh nilai sebesar 62%, dengan 80% untuk evaluasi kegiatan pembukuan, 52% untuk evaluasi inventarisasi, 65% untuk kegiatan pelaporan (Mustika, 2015). Penelitian Risma Saragih yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan" hasil penelitian menunjukkan bahwa, diketahui bahwa permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan penatausahaan adalah kurangnya pelaksanaan inventarisasi dan sumber daya pengelola BMD (Saragih, 2018). Penelitian Emy Dwi Trisnani, Moh. Dimiyati, dan Hadi Paramu yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Panatausahaan Aset Tetap” hasil penelitian menunjukkan bahwa, SPI dan penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan (Trisnani et al., 2018). Penelitian Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti yang berjudul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung” hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesesuaian aset tetap dengan peraturan yang meliputi kegiatan pembukuan 76,92% (sesuai), inventarisasi 81,54% (sangat sesuai), dan pelaporan 95,38% (sangat sesuai) (Permatasari & Hastuti, 2020). Penelitian Edison Aprilio Ayomi, Lintje Kalangi dan Dhullo afandi yang berjudul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) khusus Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ayomi et al., 2022). Terakhir, penelitian Silvi Fitra, Khaerul Umam dan Ai Siti Farida yang berjudul “Pengaruh Panatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ada pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan namun tidak signifikan (Silvi Fitria et al., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nias Barat. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan dua teori yaitu, teori efektivitas menurut duncan yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Kemudian, teori kedua menggunakan teori kualitas laporan keuangan menurut suwanda yang terdiri dari empat dimensi yaitu, Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami (Duncan dalam Steers & Jamin, 1980; Suwanda, 2013).

1.5. Tujuan

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penatausahaan aset, mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat yang menyebabkan penatausahaan aset, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangunsong (Simangunsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sepuluh informan yang terdiri dari, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah, Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, dan Staf sebanyak tiga orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap

3.1.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam penatausahaan aset di Kabupaten Nias Barat merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek kritis. Tujuan tersebut mencakup penciptaan dan pemeliharaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagai fokus utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang tepat guna mengatur alur kerja secara

terorganisir, yang secara efektif mengurangi risiko, meningkatkan koordinasi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Efektivitas pencapaian tujuan dievaluasi berdasarkan tiga indikator utama: kurun waktu, ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap dasar hukum yang relevan. Meskipun terdapat tantangan seperti keterlambatan dalam pelaporan yang berkaitan dengan masalah realisasi anggaran dan koordinasi antar unit organisasi, upaya-upaya seperti penetapan batas waktu lebih dini dari yang ditetapkan secara nasional dan adopsi regulasi baru menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penatausahaan aset.

3.1.2 Integrasi

Dalam konteks upaya meningkatkan efektivitas penatausahaan aset tetap di Kabupaten Nias Barat, integrasi berperan penting sebagai pendekatan yang menggabungkan berbagai elemen ke dalam satu kesatuan yang koheren. Proses integrasi ini melibatkan penggabungan informasi, proses, atau sumber daya yang berbeda menjadi satu entitas terpadu. Penilaian efektivitas dalam dimensi integritas, sesuai dengan teori Duncan (1945), dapat diukur melalui indikator prosedur dan sosialisasi. Prosedur dalam konteks ini merujuk pada koordinasi yang terintegrasi antara proses penatausahaan, termasuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Implementasi prosedur ini tidak terlepas dari ketaatan terhadap regulasi yang berlaku sebagai pedoman utama dalam menciptakan pencatatan yang teratur dan terpercaya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menerapkan sistem digitalisasi seperti SIMDA BMD untuk memfasilitasi proses pembukuan yang terintegrasi dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan terkait kekurangan data dan keterlambatan input.

Pada tahap inventarisasi, penerapan petunjuk teknis dengan akurat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap aset tercatat dengan baik. Proses ini melibatkan pembuatan Lembar Kerja Inventarisasi (LKI) yang menjadi kertas kerja utama sebelum menghasilkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI). Hasil inventarisasi ini berfungsi sebagai dasar untuk mengupdate rekonsiliasi akhir tahun, dengan tujuan memastikan keakuratan data dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Kabupaten Nias Barat juga telah menetapkan prosedur untuk tindak lanjut atas temuan inventarisasi, termasuk penghapusan barang yang tidak ditemukan atau mengalami kerusakan berat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku. Proses ini melibatkan verifikasi dan analisis yang seksama terhadap data yang ada, untuk kemudian membuat keputusan apakah barang tersebut layak untuk dihapuskan atau tidak.

Secara keseluruhan, upaya Kabupaten Nias Barat dalam menerapkan prosedur penatausahaan aset tetap telah mencapai efektivitas yang diukur dari kemampuan integrasi, kesesuaian dengan regulasi, dan kualitas laporan yang dihasilkan. Pendekatan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi dalam pembukuan dan inventarisasi, tetapi juga fokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan keakuratan data. Dengan demikian, proses ini berdampak pada peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

3.1.3. Adaptasi

Adaptasi dalam konteks efektivitas penatausahaan aset di Kabupaten Nias Barat mengacu pada kemampuan entitas pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi yang terjadi. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi, prosedur operasional, infrastruktur teknologi, dan pengembangan kemampuan staf untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, dua indikator utama dari teori Duncan (1945) digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adaptasi, yaitu pengembangan kemampuan individu dan penggunaan sarana/prasarana.

Pengembangan kemampuan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kompetensi staf dalam menghadapi perubahan tuntutan atau teknologi terkait penatausahaan aset. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk memastikan bahwa staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Di sisi lain, adaptasi juga mencakup digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi seperti SIPD RI, SIMDA-BMD, dan migrasi menuju E-BMD. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan format laporan yang terbaru seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, langkah-langkah menuju penggunaan E-BMD menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, efektivitas adaptasi dinilai dari kemampuan sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk perangkat lunak dan infrastruktur IT yang mendukung pencatatan dan pengelolaan aset sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun memerlukan waktu untuk implementasi sepenuhnya di setiap unit organisasi terkait, langkah-langkah ini merupakan langkah positif menuju efektivitas penatausahaan aset yang lebih baik di Kabupaten Nias Barat.

3.2. Kualitas Laporan Keuangan

3.2.1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan ketika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan cara membantu evaluasi peristiwa masa lalu dan prediksi masa depan. Informasi yang relevan dalam laporan keuangan, khususnya laporan barang milik daerah Kabupaten Nias Barat, merupakan dasar dari penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan yang memberikan gambaran kondisi aset saat ini. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah, nilai, kemanfaatan, kekurangan, dan aspek lainnya yang menjadi landasan untuk meramalkan arah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nias Barat di masa mendatang.

Penelitian menunjukkan bahwa penyampaian laporan aset secara menyeluruh dilakukan tepat waktu, yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan menjadi akurat dan tepat waktu. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan aset, khususnya terkait informasi yang diinventarisir. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi aset agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat bagi pengguna informasi.

3.2.2. Andal

Laporan keuangan harus memenuhi standar kebenaran, ketepatan, dan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan material. Dalam konteks penatausahaan pada proses pembukuan yang dilanjutkan dengan penyajian laporan

aset sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, setiap transaksi seperti perolehan/penerimaan, pemanfaatan, penyusutan, dan penghapusan di catat sesuai dengan prosedur dan format yang telah ditetapkan. Hal ini menjamin bahwa penyajian laporan dilakukan secara jujur dan akurat, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan transaksi yang terjadi.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan temuan, menandakan bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPK. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern di Kabupaten Nias Barat telah berhasil meningkatkan keakuratan dan kredibilitas laporan keuangannya, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan diverifikasi dengan baik.

3.2.3 Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya karena kebijakan akuntansi yang diterapkan setiap tahunnya konsisten. Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan internal yang akurat untuk mengevaluasi perkembangan dan kondisi keuangan dari waktu ke waktu.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) secara optimal sejak tahun 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat menjadi acuan bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam empat tahun terakhir tetap konsisten. Artinya, proses penyusunan laporan barang milik daerah sebagai bagian dari penyusunan neraca mengikuti kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, memungkinkan analisis yang konsisten dan komparatif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Nias Barat secara internal.

3.2.4 Dapat Dipahami

Penyajian laporan barang milik daerah sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat telah dilakukan dengan baik. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa penyajian tersebut dilakukan dengan terstruktur dan sistematis, sehingga informasinya mudah dipahami.

3.2. Faktor Penghambat Penatausahaan Aset Tetap

Faktor penghambat merupakan elemen yang menghalangi atau menahan proses sehingga menyebabkan ketidاكلancaran atau penundaan. Penatausahaan aset tetap di Kabupaten Nias Barat masih memiliki beberapa hambatan yaitu:

Pertama, Sarana dan prasarana yang terbatas, terutama dalam hal teknologi informasi dan infrastruktur fisik, menjadi tantangan utama dalam penatausahaan aset tetap di Kabupaten Nias Barat. Hal ini menghambat efisiensi operasional, akurasi data, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan fasilitas seperti komputer atau laptop, masih ada kesenjangan dalam akses dan kualitas sarana ini di seluruh kecamatan dan kelurahan. Kedua, Keterbatasan dalam kemampuan sumber daya manusia, termasuk jumlah dan kualitas personel yang terlatih, menjadi hambatan serius dalam efisiensi dan akurasi penatausahaan aset tetap. Kekurangan personel yang terlatih mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab, kesalahan dalam prosedur, dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penggunaan sistem digital yang kompleks memerlukan keterampilan teknis dan analitis yang tinggi, yang tidak

selalu tersedia pada semua pengurus barang. Ketiga, Rotasi pegawai yang tidak tepat, tanpa mempertimbangkan spesialisasi atau keahlian tertentu, mengganggu kontinuitas dan efektivitas penatausahaan aset. Pergantian pejabat penatausahaan barang yang tidak memadai menyebabkan kesenjangan pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan risiko kesalahan atau kehilangan data. Hal ini juga mengganggu kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar staf yang terlibat dalam manajemen aset. Keempat, Keterbatasan anggaran merupakan faktor hambatan lain dalam pengelolaan barang milik daerah. Meskipun ada alokasi anggaran dalam rencana kerja BPKPD, masih terdapat kegiatan yang tidak mendapatkan dana yang cukup. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Tabel berikut merupakan anggaran pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nias Barat.

Tabel 3. 1
Anggaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Barat

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif |
|---|-----------------------|
| Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD | 0 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 50.000.000 |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD | 0 |
| Penatausahaan BMD | 250.000.000 |
| Inventarisasi BMD | 125.000.000 |
| Pengamanan BMD | 75.000.000 |
| Penilaian BMD | 75.000.000 |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD | 50.000.000 |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD | 75.000.000 |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD | 50.000.000 |
| Penyusunan Laporan BMD | 50.000.000 |
| Pembinaan Pengelolaan BMD | 0 |

Sumber: Rencana Kerja BPKPD Kab. Nias Barat Tahun 2022

Dengan demikian, penting bagi pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran pada penatausahaan aset. Ini bisa melibatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia yang bersertifikasi, atau pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur fisik yang diperlukan. Selain itu, pemerintah kabupaten juga dapat mempertimbangkan kemitraan dengan sektor swasta atau penggunaan solusi inovatif seperti sistem manajemen aset berbasis cloud untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Masalah Penatausahaan Aset Tetap

Terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Nias Barat dalam mengatasi permasalahan penatausahaan aset tetap yaitu, Pertama Sosialisasi, upaya sosialisasi dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder yang terkait, baik internal

maupun eksternal, tentang kebijakan, prosedur, dan perkembangan sistem digital. Ini dilakukan melalui ruang diskusi langsung, komunikasi via media seperti grup WhatsApp, serta pengiriman surat periodik kepada setiap OPD. Meskipun ada keterbatasan dalam akses jaringan komunikasi di beberapa daerah, upaya ini tetap memberikan akses yang lebih mudah dan cepat dalam berkomunikasi. Kedua, penerapan prosedur yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait penatausahaan aset tetap. Ini mencakup penetapan tanggung jawab, proses akuisisi, dan sistem pengelolaan yang sistematis. Penerapan kebijakan ini membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta menindaklanjuti temuan dari lembaga audit seperti BPK dengan melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Ketiga, pengembangan kemampuan pegawai dimana Peningkatan kemampuan pegawai menjadi fokus utama dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara reguler. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai di bidang pengelolaan barang milik daerah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Pelatihan ini diadakan baik secara online maupun langsung, bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Universitas Brawijaya, yang menghasilkan sertifikasi yang dapat menjadi bukti valid atas kompetensi mereka. Keempat, pengembangan struktur organisasi dimana, Kabupaten Nias Barat juga melakukan pengembangan struktur organisasi dengan menetapkan peta jabatan yang jelas untuk bidang pengelolaan barang milik daerah. Dengan memiliki jumlah dan jenis jabatan yang sesuai, seperti Kepala Sub Bidang dan staf analisis aset negara, mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas penatausahaan. Perencanaan yang matang untuk pengisian jabatan yang kosong juga diperlukan untuk mendukung efisiensi operasional. Terakhir, optimalisasi penggunaan anggaran, dimana Mengelola anggaran dengan baik menjadi kunci dalam mendukung seluruh kegiatan penatausahaan aset. Setiap OPD diarahkan untuk mengelola anggarannya secara efisien dan mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga pengadaan dan pemeliharaan aset dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengalami hambatan keuangan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah pelaksanaan penatausahaan aset daerah di Kabupaten Nias Barat telah berjalan efektif. Hal ini berbeda dengan penelitian Edison Aprilio Ayomi, Lintje Kalangi, Dhullo afandi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) khusus Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai (Ayomi et al., 2022). Kemudian penelitian dari Risma Saragih menemukan bahwa, permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan penatausahaan adalah kurangnya pelaksanaan inventarisasi dan sumber daya pengelola BMD (Saragih, 2018).

IV. KESIMPULAN

Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap efektif dilaksanakan dengan pembukuan yang akurat. Meskipun demikian, inventarisasi masih perlu dioptimalkan. Kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya manusia, manajemen rotasi pegawai, dan anggaran dapat menghambat efektivitasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, disarankan sosialisasi yang lebih luas, penerapan prosedur yang terstruktur, dan pengembangan kemampuan pegawai. Rekomendasi termasuk meningkatkan konektivitas jaringan, alokasi anggaran untuk pelatihan sertifikasi, rotasi pegawai berbasis kompetensi, dan optimisasi penggunaan anggaran dengan analisis kebutuhan prioritas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penatausahaan aset daerah agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2022*. (2023).
- Ayomi, E. A., Kalangi, L., & Afand, D. (2022). Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Evaluation of Land Asset Administration in The General Section of The Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 687–692.
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540–558. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018-2022*. (2023).
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456>
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 58–68. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i1.112>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (n.d.).
- Permatasari, A. D., & Hastuti. (2020). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Irwns*, 2, 26–27.
- Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi

- Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- Silvi Fitria, Khaerul Umam, & Ai Siti Farida. (2022). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 826–844. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2853>
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Steers, R. M., & Jamin, M. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukran, Rajindra, & Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah An Analysis of Quality of Central Sulawesi Government Financial Report. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 03(08), 421–429.
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. PPM.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Bisma*, 11(3), 271. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6470>

